

TENTANG PROYEK AMAHUTA 2024

Gambaran umum

Pada Tahun 2023, Samdhana Institute dan FOKER LSM PAPUA bersepakat untuk memberikan nama Proyek **Improving Trust and Values to Secure Land and Forest of Indigenous Peoples in Tanah Papua** dengan nama AMAHUTA Papua Papua, yang merupakan singkatan dari Amankan Hak-Hak Masyarakat Adat, Hutan dan Tanah Papua. Proyek ini berjalan di 6 Kabupaten yang tersebar di 5 Provinsi di Tanah Papua yaitu: Kabupaten Sorong dan Tambrauw di Provinsi Papua Barat Daya, Kabupaten Teluk Bintuni di Provinsi Papua Barat, Kabupaten Sarmi di Provinsi Papua, Kabupaten Jayawijaya di Provinsi Papua Pegunungan dan Kabupaten Merauke di Provinsi Papua Selatan.

Setelah melewati phase persiapan unit layanan proyek dan konsultasi Kabupaten di Tahun pertama (2023) proyek ini memasuki tahun kedua 2024 dengan target distribusi dana hibah kepada mitra (sub-grantee) dalam menjalankan aktifitas menuju deliverable outcome/outputs yang dijanjikan didalam proposal. Ada 5 outcome/hasil yang diharapkan dari keseluruhan aktifitas proyek AMAHUTA PAPUA yaitu:

1. Tersedianya kerangka legal yang dibutuhkan dalam memperkuat layanan dan upaya pengakuan hak-hak masyarakat adat di 6 Kabupaten target
2. Terbangunnya kelembagaan dan mekanisme layanan pendaftaran tanah adat di level provinsi yang juga dapat dioperasikan di 6 kabupaten target.
3. Alokasi pembiayaan yang berdasar pada kelembagaan layanan serta program dan kebijakan yang mendukung pengakuan, perlindungan hak masyarakat adat serta mendukung keterlibatan perempuan adat.
4. Menguatnya peran dan kapasitas layanan Lembaga-Lembaga Adat, LSM, Kelompok Perempuan di Tanah Papua dalam pengelolaan kegiatan mengamankan hak masyarakat adat, hutan dan tanah. Secara khusus, terbangunnya Unit Pengelola Hibah di FOKER LSM PAPUA FOKER LSM Papua LSM Papua dan penguatan secara berkala kapasitas anggota FOKER LSM PAPUA LSM Papua sebagai mitra pendukung lembaga adat dan masyarakat adat di tingkat tapak.
5. Terbangunnya kerja kolaborasi para pihak yang efektif dalam mendukung upaya masyarakat adat memetakan, mengakui dan melegalisasi hak adat atas tanah dan hutan.

Mekanisme Penyaluran Pendanaan Proyek

Untuk mencapai output yang diharapkan, ada 4 mekanisme penyaluran dana proyek AMAHUTA PAPUA dari Samdhana sebagai organisasi pengelola Fidusia yaitu:

- Pembiayaan kepada mitra pemilik dan pelaksana pekerjaan (co-implementing partners) yaitu FOKER LSM PAPUA
- Dukungan dana hibah kepada mitra (sub-grantee). Sampai Desember 2024, telah terdistribusi dukungan dana hibah (sub-grant) dilakukan kepada 14 organisasi sebagaimana daftar di table 1. Dimana 13 kontrak hibah dikeluarkan oleh Samdhana Institute dan 1 kontrak dikeluarkan oleh FOKER LSM PAPUA
- Kontrak jasa pihak ketiga / technical expertise (consultant). Termasuk kontrak jasa kepada Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) dan beberapa consultant individual sebagai support team dalam proyek.
- Pengelolaan dana internal dengan mekanisme uang muka (cash advance) di Samdhana (fiducia/fiscal sponsor).

Tabel 1. Daftar Mitra, Lokasi, Jangka Waktu kegiatan dan Nilai Pembiayaan.

No	Kabupaten	Mitra	Jangka Waktu Kontrak	Nilai Kontrak
1	Kabupaten Merauke, Propinsi Papua Selatan	HARMONI ALAM PAPUANA	18 Juli 2024 - 31 Januari 2025 (6 Bulan)	Rp 459.600.000
2	Kabupaten Merauke, Propinsi Papua Selatan	YAYASAN WASUR LESTARI PAPUA (YWLP)	15 Juli 2024 - 15 Maret 2025 (8 Bulan)	Rp 747.051.664
3	Kabupaten Sarmi, Propinsi Papua	Perkumpulan untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat (PPMA)	19 Juli 2024 - 20 November 2024 (4 Bulan)	Rp 648.550.000
4	Kabupaten Sarmi, Propinsi Papua	Yayasan Konsultasi Independen Pemberdayaan Rakyat Papua (KIPRa)	25 Juli 2024 - 31 Januari 2025 (6 Bulan)	Rp 567.625.000
5	Kabupaten Merauke, Propinsi Papua Selatan	Perkumpulan Lembaga Advokasi Peduli Perempuan (El Adpper)	25 Juli 2024 - 31 Januari 2025 (6 Bulan)	Rp 748.050.000
6	Kabupaten Bintuni, Propinsi Papua Barat	Pengembangan Masyarakat dan Konservasi Sumberdaya Alam (PERDU)	23 August 24 - 23 Feb 25 (6 bulan)	Rp 750.000.000
7	Kabupaten Bintuni, Propinsi Papua Barat	PANAH PAPUA	19 August 24 - 19 Feb 25 (6 bulan)	Rp 750.000.000,00
8	Kabupaten Sorong dan Kabupaten Tambrow, Propinsi Papua Barat Daya	Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamain (PBHKP)	19 August 24 - 19 Feb 25 (6 bulan)	Rp 749.820.000,00
9	Kabupaten Sorong dan Kabupaten Tambrow, Propinsi Papua Barat Daya	Bengkel Pembelajaran Antar Rakyat (BELANTARA) Papua	23 August 24 - 23 Feb 25 (6 bulan)	Rp 480.880.000,00
10	Kabupaten Bintuni, Propinsi Papua Barat	MNUKWAR PAPUA	23 August 24 - 23 Feb 25 (6 bulan)	Rp 731.340.000,00
11	Kabupaten Merauke, Propinsi Papua Selatan	VERTENTEN	7 bulan	Rp 1.656.190.000,00
12	Kabupaten Jayawijaya Propinsi Papua Pegunungan	HUMI INANE	6 bulan	Rp 749.550.000
13	Kabupaten Tambrow, Propinsi Papua Barat Daya	MEIY MONGKA PAPUA	4 bulan	Rp 409,650,000
14*	Kabupaten Jayawijaya Propinsi Papua Pegunungan	YAYASAN BINA ADAT WELESI	xxxxxxx	Rp xxxxxxxx

* kontrak dikeluarkan oleh Foker LSM PAPUA.

Audit

Sesuai dengan kontrak Samdhana dan Tenure Facility dan minutes meeting pertemuan samdhana-FOKER dan tenure facility tanggal 1 Juli 2024, subject to be audited yang wajib dikunjungi dan dilakukan pemeriksaan selain Samdhana adalah:

- Co-implementing partners dalam hal ini FOKER LSM PAPUA
- Mitra (sub-grantee) yang menerima pembiayaan yang nilai dana-nya > (lebih besar) dari \$ 50,000,- USD pada saat tanggal kontrak ditandatangani.